



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 120.04./7504/OTDA tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Asisten Sekretaris Daerah agar mengoordinasikan dan mengevaluasi secara berkala penyusunan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan bidang tugas dan SKPD/UKPD yang dikoordinasikan serta mensinergikannya dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).

KEDUA : Inspektur/Para Kepala Badan/Para Kepala Dinas/Para Direktur RSUD/Direktur RSKD/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Para Kepala Biro/Sekretaris DPRD dan Sekretaris DP KORPRI agar :

- a. Melakukan penyusunan Data LPPD SKPD Tahun 2015 dengan mengakomodir laporan dari UKPD/UPT yang berada di bawahnya sesuai dengan sistematika dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini;
- b. Melakukan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran II Instruksi Gubernur ini;
- c. Melakukan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran III Instruksi Gubernur ini, terdiri atas :
 1. Lampiran III.a yaitu untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan satu urusan; dan
 2. Lampiran III.b yaitu untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dua urusan.
- d. Melakukan pengisian data sesuai dengan bidang tugas pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana format dalam Lampiran IV Instruksi Gubernur ini;
- e. Melakukan penyampaian data sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksanaan mengenai Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pada SKPD/UKPD sebagaimana format dalam Lampiran V Instruksi Gubernur ini;
- f. Melakukan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lt. X, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, Telepon 3822107/3822109 paling lambat Minggu Keempat bulan Februari 2016 dalam bentuk hard copy dan soft copy diemail ke LPPD.DKI.2014@gmail.com;
- g. Melakukan penyampaian data seorang pejabat yang ditunjuk sebagai penghubung (Liaison Officer/LO), yang menguasai informasi dan permasalahan pada SKPD masing-masing, dengan biodata sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Instruksi Gubernur ini, paling lambat Minggu Pertama bulan Februari 2016; dan
- h. Penyampaian data/informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan terkait dengan LPPD kepada Tim Monitoring dan Evaluasi LPPD 2014 Provinsi DKI Jakarta serta kooperatif kepada Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2016.

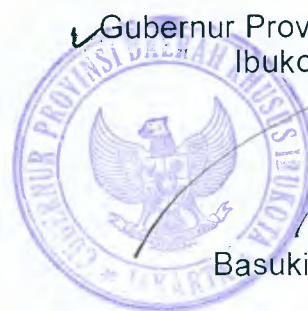
✓

- KETIGA : Para Walikota dan Bupati agar merekap laporan/data dari Kecamatan dan memasukkannya ke dalam data pendukung LPPD Kota/Kabupaten Tahun 2015 Urusan Otonomi Daerah, serta menyampaikan data LPPD Kota/Kabupaten kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan paling lambat Minggu Keempat Februari 2016 dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- KEEMPAT : Para Camat agar merekap laporan/data dari Kelurahan dan memasukkannya ke dalam data pendukung Kecamatan Tahun 2015 serta menyampaikan data pendukung Kecamatan kepada Walikota/Bupati paling lambat akhir Minggu Ketiga Bulan Februari 2016 dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- KELIMA : Para Lurah agar menyampaikan data pendukung LPPD Kelurahan kepada Camat paling lambat Minggu Kedua Bulan Februari 2016 dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- KEENAM : Biro Tata Pemerintahan agar menyelesaikan penyusunan LPPD Provinsi paling lambat Minggu Ketiga bulan Maret 2016 dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2016 serta melaksanakan monitoring dan evaluasi LPPD 2015 dan menerima Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2015 pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2016
Tanggal 19 Februari 2016

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DATA LPPD SKPD

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Ruang lingkup sasaran

Diisi data-data obyek (sasaran) tugas SKPD. Contoh Dinas Pendidikan a.l. menerangkan jumlah siswa, jumlah guru, jumlah dan kualitas bangunan sekolah; Dinas Bina Marga a.l. menerangkan jumlah dan kualitas jalan (ruang, panjang dan luas jalan berdasarkan kelasnya) dalam bentuk tabel.

Catatan :

Khusus untuk Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi memasukkan uraian tentang :

- a. Data geografi (luas, batas wilayah; jumlah Kecamatan, Kelurahan, RT, RW)
- b. Data demografi :
 - Jumlah penduduk per kelompok umur (L/P);
 - Jumlah rumah tangga (per Kecamatan)
 - Jumlah rumah (per Kecamatan)
 - Jumlah rumah bersanitasi baik (per Kecamatan)
 - Jumlah rumah pengguna air bersih (per Kecamatan)
 - Tingkat kemiskinan (per Kecamatan)
- c. Data Kewilayahan lainnya.

B. Kelembagaan SKPD

Diisi nama dan bentuk kelembagaan serta pejabat pada SKPD, UKPD serta UPT yang ada di bawah SKPD yang bersangkutan.

BAB II VISI, MISI, RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS

A. Visi dan Misi SKPD

Diisi visi dan misi SKPD dalam mendukung Visi dan Misi Daerah

B. Rencana Strategis

Diisi nomor dan tanggal penetapan Renstra SKPD dan pokok-pokok Renstra dalam mewujudkan visi dan misi SKPD

C. Program Prioritas SKPD

Diisi program prioritas SKPD, terutama yang berkaitan dengan program prioritas daerah. Bila SKPD melaksanakan lebih dari 1 (satu) urusan, agar penulisannya dipisah. Contoh:

1. Program Prioritas Urusan.....
 - a.....
 - b.....
2. Program Prioritas Urusan.....
 - a.....
 - b.....

P-1

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
	Jumlah							

2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan

Rincian anggaran belanja, realisasi dan pelaksana untuk masing-masing urusan pilihan.

No	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
	Jumlah							

Catatan :

1. Dalam hal ini SKPD dianggap melaksanakan urusan pokok sesuai dengan kewenangan (urusan), tupoksi dan kelembagaannya. Satu SKPD dapat melaksanakan lebih dari satu urusan.
2. Yang dimaksud Urusan Wajib adalah :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Pekerjaan Umum
 - e. Penataan Ruang
 - f. Perencanaan Pembangunan
 - g. Perumahan
 - h. Kepemudaan dan Olahraga
 - i. Penanaman Modal
 - j. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - l. Ketenagakerjaan
 - m. Ketahanan Pangan
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat
 - p. Perhubungan
 - q. Komunikasi dan Informatika
 - r. Pertanian
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- t. Otonomi Daerah, PUM, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- v. Sosial
- w. Kebudayaan
- x. Statistik
- y. Perpustakaan
- z. Kearsipan

3. Yang dimaksud Urusan Pilihan adalah :

- a. Kelautan dan Perikanan
- b. Pertanian
- c. Kehutanan
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral
- e. Pariwisata
- f. Perindustrian
- g. Perdagangan
- h. Ketransmigrasian

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan daerah

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan

a. Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah

Contoh : Tabel Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah Urusan.....

No	Program Nasional	Program Daerah
Jumlah		

b. Jumlah dan Realisasi Kegiatan Tahun 2014

Contoh : Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Urusan.....

No	Nama Program	Jml. Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
1	2	3	4	5 (4/3)
	Jumlah			

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

a. Pencapaian SPM

Cantumkan daftar SPM dan pencapaiannya sesuai dengan urusan yang dilaksanakan selama periode RPJMD (2013 – 2017)

Bila belum ada SPM gunakan IKU SKPD atau bila dimungkinkan SPM dan IKU ditulis kedua-duanya. Dalam hal ini SPM bisa juga dijadikan IKU. Bila SKPD belum memiliki SPM dan IKU, cantumkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan yang merupakan program atau kegiatan unggulan yang mencakup target dan realisasi yang terukur.

D-1

Contoh : Tabel Capaian SPM/IKU Urusan

No	Uraian SPM/IKU/Tapkin	Target 2014- 2017		Capaian tahun		
		Volume	Satuan	2012	2013	2014

b. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV instruksi ini diuraikan pada bagian ini.

IKK sedapat mungkin menggambarkan data selama masa RPJMD atau minimal 2 tahun terakhir

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai , Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Menerangkan jumlah kualitas dan klasifikasi seluruh pegawai pada SKPD dan UKPD dalam satu SKPD.

a. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel : Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai Dinas/Badan.....

No	Klasifikasi	Dinas	Suku Dinas						Jumlah
			JP	JU	JB	JS	JT	KS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3 s.d 9)
A.	Golongan (jumlah)								
	• Golongan IV								
	• Golongan III								
	• Golongan II								
	• Golongan I								
B	Eselon (jumlah)								
	• Eselon I								
	• Eselon II								
	• Eselon III								
	• Eselon IV								
	• Eselon V								
	• Fungsional								
	• Staf								
C	Pendidikan(jumlah)								
	• S3								
	• S2								
	• S1								
	• Diploma								
	• SLTA								
	• SLTP								
	• SD								

Catatan :

Kolom 3 sampai 9 disesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada SKPD masing-masing.

P- K

b. Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan, Pangkat dan Diklatpim

Tabel : Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural pada Dinas/Badan.....

No	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang Terisi	Jumlah Pejabat yang Memenuhi Persyaratan		
				Pendidikan	Pangkat	Diklatpim
1	2	3	4	5	6	7
1	• Eselon I					
	• Eselon II					
	• Eselon III					
	• Eselon IV					
	• Eselon V					
	Jumlah					

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Merupakan akumulasi data dari SKPD, UKPD dan UPT dari SKPD yang bersangkutan.

Tabel : Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan.....

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
Anggaran Urusan Pendidikan		
1. Belanja tidak langsung		
2. Belanja langsung		
a. Belanja Barang dan Jasa		
b. Belanja Pemeliharaan		
c. Belanja Modal		
d. Belanja Modal		
Catatan Perbandingan :		
• Alokasi Anggaran Urusan : APBD		
• Belanja Modal : Belanja urusan		
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang dan Jasa		
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Urusan		

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan SKPD sesuaikan dengan tupoksi baik merupakan top down yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP, RPJMD/RKPD dan RKT atau Renja SKPD) maupun bottom up, seperti usulan perbaikan sarana, prasarana dan lain-lain.

Contoh Tabel : Sinkronisasi perencanaan program urusan

No	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1	RKPD 2014	10	RENJA SKPD; RKPD	100
2	RENJA SKPD 2014	10	RKA: RENJA SKPD	100
3	RKA 2014	10	DPA : RKA	100
4	DPA 2014	10		

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

a. Prasarana berupa tanah (bila ada)

Diuraikan jumlah seluruh bidang tanah yang dikuasai (aset) SKPD dan jumlah bidang tanah yang telah dimanfaatkan (bila mungkin dengan luasnya)

b. Prasarana utama pendukung tupoksi

Contoh : Dinas Pendidikan menyajikan data jumlah sekolah, jumlah gedung sekolah, jumlah laboratorium sekolah, dll; Dinas Olahraga dan Pemuda menyajikan data jenis dan jumlah fasilitas olah raga, dan seterusnya.

c. Fasilitas/prasarana informasi

Contoh Tabel : Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Dinas/Badan.....

No	Jenis Fasilitas/Prasarana	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Dinas	JP	JU	JB	JS	JT	KS	UPT	
1	Papan Pengumuman									
2	Kotak Pengaduan									
3	Media Massa									
4	Email									

Catatan:

- Website :
- Email :

d. Prasarana dan sarana lain yang patut dilaporkan

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta solusi pemecahannya.

Contoh : Beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan Tahun 2015 di DKI Jakarta antara lain :

- a. Saat ini dibutuhkan banyak pegawai sebagai penjaga sekolah, guru olahraga dan guru lainnya.
- b. Terdapat 233 SDN dan 39 SMPN yang berada di daerah rawan banjir.
- c. Masih banyak fasilitas gedung yang perlu direhabilitasi seperti ruang perpustakaan, laboratorium, ruang UKS, serta rumah dinas Kepsek/guru/penjaga sekolah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap menambah SDM aparatur dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kekurangan penjaga sekolah antara lain diatasi dengan petugas harian lepas (Phl) yang dibiayai oleh sekolah yang bersangkutan. Sedangkan penambahan tenaga guru dilakukan sesuai dengan formasi dan prioritas rekrutmen pegawai, perbaikan gedung dan prasarana sekolah lainnya dilakukan dengan rehabilitasi ringan sampai rehabilitasi berat/total.

9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- a. Daftar dasar hukum pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik sesuai dengan urusan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk Perda, Pergub atau Keputusan Kepala SKPD (contoh tentang pedoman, juklak, juknis, SOP dll)

- b. Hal-hal yang bersifat inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang bersifat SDM, prosedur, teknologi informasi, dll.
 - c. Prestasi nasional dan internasional yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan (disesuaikan dengan urusan yang menjadi tupoksi)

Diuraikan persis sama dengan Sub B dengan penambahan pada poin 2 yaitu Realisasi Program dan Kegiatan sehingga menjadi total 10 poin.

- D. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
1. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta data terlampir (Lampiran II)
 2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum
Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran III.a dan Lampiran III.b.
 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan
Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, tingkat pencapaian kinerja urusan wajib dan pilihan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Lampiran IV)

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar hukum
2. Instansi pemberi tugas pembantuan
3. Program dan kegiatan
4. Realisasi pelaksana program dan kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan
7. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
8. Kondisi sarana dan prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang mencukupi atau lainnya)
9. Permasalahan dan solusi
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

1. Dasar hukum
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota untuk Provinsi
3. Sumber dan jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana

P 1

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Daerah yang diajak kerjasama
2. Dasar hukum
3. Bidang kerjasama
4. Nama kegiatan
5. Satu Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka waktu kerjasama
9. Hasil (output) dari kerjasama
10. Permasalahan dan solusi
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Diuraikan persis sama dengan Sub A

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum koordinasi
2. Materi koordinasi
3. Instansi vertikal yang terlibat
4. Sumber dan jumlah anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan
8. Hasil dan manfaat koordinasi
9. Tindak lanjut hasil koordinasi
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu ditindaklanjuti)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (sesuaikan dengan tupoksi/kegiatan)

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana (nasional, regional/provinsi atau lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber dan jumlah anggaran
4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana
8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis kawasan khusus
2. Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum penetapannya
3. Sumber anggaran
4. Permasalahan yang dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kawasan khusus
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani
3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
4. Penanggulangan dan kendalanya
5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan
6. Sumber dan jumlah anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berisi rangkuman evaluasi dan kajian/analisis secara menyeluruh tentang materi laporan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V yang berupa pernyataan-pernyataan, misalnya: Program ini (disebutkan) berjalan lancar dan berhasil sesuai rencana, atau pelaksanaan kegiatan ini (sebutkan) tidak mencapai target yang ditentukan, karena sebab-sebab tertentu (sebutkan sebab-sebabnya)


Hambatan yang menonjol adalah penyebab kurang lancarnya pelaksanaan pekerjaan seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait atau terlalu sempitnya waktu pelaksanaan dan sebagainya.

B. Saran

Berisi gagasan atau pemikiran untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Saran juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, misalnya:

Sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan ganti rugi kepada yang berhak sebagai akibat tanahnya digunakan untuk kepentingan pembangunan waduk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka disarankan agar dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh kepastian kepemilikan tanah dan status tanahnya.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]

Basuki T. Purnama

Lampiran II : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2016
Tanggal 19 Februari 2015

IKK TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan			
1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi.	Jumlah kab/kota yang memiliki Perda IMBkabupaten/kota - Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi..... kab/kota%				
				Peraturan ttg kependudukan	2	Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan	Jumlah kab/kota yang memiliki Perda Kependudukan Jumlah Kab/kota.%		
	Personil (Kebijakan ketersediaan alat transitib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2015 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Satpol PP (PNS) tahun 2015 yg ditandatangani oleh pejabat berwenang	...per50.000 penduduk				
				Penyampaian laporan kepada pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007	Waktu Penyampaian LPPD 2014 (tanggal/bulan/tahun)	Bukti Pengiriman: LPPD Tahun 2014 disampaikan ke Kemendagri (Dijen Otda) pada tanggal -2015sesuai Surat Pengantar nomor ----- tanggal-----2015.	Tepat/tidak	
							Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lap Keuangan berdasarkan PP 8/2006	Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 2014 berdasarkan bukti tanda terima(tanggal/bulan/tahun)
	Implementasi Standar Pelayanan Minimal(SPM)	6	Ketepatan waktu penyampaian Lap Kinerja berdasarkan PP8/2006	Waktu Penyampaian Laporan Kinerja 2014 berdasarkan bukti tanda terima (tanggal/bulan/tahun)	Bukti Pengiriman: Penyerahan LAKIP Kab/Kota Tahun 2014 disampaikan ke Kementerian PAN & RB tanggal ----- 2015 sesuai Surat Pengantar nomor----- tanggal ----- 2015	Tepat/tidak				
				7	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/Kota yang wajib menyampaikan LPPD	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota 1. Kab/kota xxx Urusan. 2. Kab/kota xxx Urusan 3. Kab/kota xxx Urusan 4. Kab/kota xxx Urusan, dsturusan	1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan	

11

ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun2015)	Capain Kinerja	Keterangan
	Hubungan antar daerah	8	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MoU yang masih berlaku tahun 2015 1. No dan tgl MoU yang berlaku s d tahun 2015 2. No dan tgl MoU yang berlaku s d tahun 2015 3. Dst...	Jumlah MoU yang masih berlaku tahun 2015 1. No.../MoU.1-Huk/2015 2. No.../MoU.2-Huk/2015 Dst...	MOU	
3	Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	9	Kesesuaian prioritas pembangunan	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional dibagi 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional.	Daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 2014 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas	%	
	Kewenangan	10	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kab/kota kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan.	Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kab/kota kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan	%	
		11	Waktu penetapan perda APBD 2015	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2015	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2015		
		12	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/tidak	
	Keuangan	13	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja	Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015 Urusan Pendidikan Rp. Urusan Kesehatan Rp. Urusan Lingkungan hidup Rp. Urusan PU Rp. Urusan Sosial Rp. Urusan Tenaga Kerja Rp. Urusan Koperasi Rp. Urusan Satpol PP Rp. Urusan Kependudukan & Capil Rp. Total Belanja APBD Rp.	%	
		14	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja urusan pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah total belanja	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan 1. Ur Pendidikan 2. Ur Kesehatan	%	
		15	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak ada standar	Apabila ADA	Ada/Tidak ada	

ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
		16	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2015 dibagi Penduduk pada akhir tahun 2015	-Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2015 -Penduduk pada akhir tahun 2015		
		17	Keberadaan Sistem Informasi Kepegawaian	ada atau tidak adanya data base kepegawaian	1. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1 2. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #2	Ada/tidak	
	Kelembagaan	18	Penataan SKPD	Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb: 1)Bagian (Setda)= ---unit 2)Dinas = --- unit 3)Badan = --- unit 4)Kantor = --- unit 5)Rumah Sakit= --- unit 6)Lembaga Teknis lainnya 7)Kabupaten/kota= --unit	---	unit
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	19	Perda yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015 1. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 2. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015 3. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2015	Perda	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT	20	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 dibagi RAPERDA yang diusulkan tahun 2015	Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015 - Raperda yang diusulkan DPRD tahun 2015%	
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	21	Keputusan DPRD yang ditindak lanjut oleh Pemda	Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2015 dibagi Keputusan DPRD dalam tahun 2015	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2015 Keputusan DPRD dalam tahun 2015%	
		22	Tindak lanjut keputusan Gubernur (KepGub)	Jumlah Kep Gub yang ditindak lanjut dibagi jumlah Kep Gub dalam tahun 2015	Keputusan Gubernur tahun 2015 yang ditindaklanjuti Keputusan Gubernur tahun 2015%	
		23	Peraturan Gubernur yang ditindak lanjut	Jumlah Peraturan Gubernur yang ditindak lanjut dibagi jumlah Peraturan Gubernur dalam tahun 2015	Peraturan Gubernur Tahun 2015 yang ditindaklanjuti Peraturan Gubernur Tahun 2015%	

P R

ASPEK	Fokus	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	24	Jumlah perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan dibagi dengan jumlah perda yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi	- PERDA yang dibatalkan - PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah %	
8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda atau PerGub tentang konsultasi publik	25	Keberadaan perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada Perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada/tidak ada PERDA/PerGub tentang konsultasi publik	Ada/tidak	
	Media informasi pmda yang dapat diakses oleh publik	26	Adanya media informasi pmda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro, humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Pergub	1. Print Out Halaman depan Web Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1 2. Media informasi yang dapat diakses oleh publik #2 3. Media informasi yang dapat diakses oleh publik #3 Dst...	Ada/tidak	
9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	27	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 dibagi Dana perimbangan	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2015 %	
	Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	28	Belanja Publik terhadap DAU	Total belanja langsung dibagi DAU thn 2015 x 100%	- Belanja Langsung (Realisasi) - DAU Tahun 2015 %	
	Alokasi Belanja pada APBD	29	Belanja publik terhadap total APBD	Total Belanja langsung tahun 2015 (realisasi) dibagi Total Belanja APBD tahun 2015 x 100%	- Total Belanja langsung tahun 2015 (realisasi) %	
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dim APBD (Realisasi)	Jumlah PAD (Realisasi) Tahun 2015 dibagi Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015 x 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2015 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015 %	

PK

ASPEK	Fokus	No	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2015)	Capaian Kinerja	Keterangan
11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, TATAUSAHA, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan(Lapkeu)	31	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015	Opini tahun 2014 = Opini tahun 2015 =	Opini 1) WTP/ unqualified opinion; 2) WDP/qualified opinion; 3) TMP/disclaimer opinion), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/adverse opinion)
	Besaran SILPA	32	SILPA thdp total pendapatan	SILPA tahun 2015 dibagi Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015 x 100%	SILPA Tahun 2015 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015	%	
	Realisasi Pendapatan	33	Realisasi terhadap PAD anggaran pendapatan	Realisasi PAD thn 2015 dibagi anggaran pendapatan 2015	Realisasi PAD Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dalam APBD 2015	%	
	Realisasi belanja	34	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja dalam APBD x 100%	Realisasi Belanja Tahun 2015 Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2015	%	
	Pengawasan Inspektoral Provinsi	35	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI PER 31 Des 2015	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2015. Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2015	%	
	Peta potensi daerah	36	Realisasi PAD 2015 terhadap potensi PAD	Realisasi PAD 2015 dibagi dengan potensi PAD 2015	Realisasi PAD Tahun 2015 Potensi PAD Pada tahun 2015	%	
	Peningkatan Pendapatan Asli	37	Peningkatan PAD	(PAD 2015 - PAD 2014) : PAD 2014 x 100%	Total PAD pada tahun 2015 Total PAD pada tahun 2014	%	
	Penghargaan	38	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2015	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015	Penghargaan	
	Pengadaan barang dan jasa	39	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada Perda/Keputusan KDH tentang E-Procurement	ada/tidak ada PERDA tentang E-Procurement	Ada/Tidak	
	Daya saing daerah	40	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi izin investasi dalam tahun 2015	Persetujuan izin investasi pada Tahun 2015	...ljin	



Lampiran IIIa : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2016
Tanggal 19 Februari 2016

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

PROVINSI :
NAMA SKPD :
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

Aspek	No	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	Program Nasional ¹ (yang melekat dikementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah Program Nasional yg Dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD	Lihat Program Nasional RKP 2015 Untuk masing-masing urusan, terlampir.		
	2	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/LPNK	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP: SOP #1 Pelaksanaan UN SOP #2 Penerimaan Siswa Baru SOP #3 Juknis Kalender Pendidikan Dst...	Ada / Tidak Ada	SOP adalah petunjuk tertulis Mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria(NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri Pembina teknis		
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	3	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada		%	
3 PENATAAN KELEMBAGAAAN DAERAH	4		Struktur jabatan dan eselonering yang teris	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi Jumlah jabatan yang harus adax 100%	Jumlah jabatan yang ada		%	
	5	Pengisian struktur jabatan	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #1 Dst...		Ada/tidak ada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.

Handwritten signature or initials.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PNS SKPD Jumlah PNS Provinsi 		Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim Jumlah pejabat SKPD yang ada %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangatan Jumlah pejabat SKPD yang ada %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJASKPD - RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dokumen perencanaan yang ada RENSTRA SKPD RENJASKPD RKA-SKPD jenis dokumen	
			10	Jumlah Program RKPJ yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RKPJ yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah program RKPJ yang diakomodir dalam Renja SKPD Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD %	Mengacu dokumen RKPJ tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
			11	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD Jumlah Program dalam RKA SKPD %	Mengacu dokumen RKA-SKPD Tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program dalam RKA SKPD %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2014 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015
			13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Total anggaran SKPD Total belanja APBD (anggaran) %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Belanja Modal SKPD Realisasi Total Belanja SKPD %	Mengacu LKD tahun 2015

R P

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total Belanja pemeliharaan dibagi dengan total belanja barang dan jasa x 100%	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD - Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD%	Mengacu LKD tahun 2015	
			16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD - Total Realisasi Belanja SKPD%	Mengacu APBD tahun 2015	
	Laporan keuangan SKPD	Keberadaan laporan keuangan SKPD(Neraca, Caik)	17	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada(Neraca, Caik)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada,sebanyak----jenis, sbb : 1..... 2..... 3.....	Laporan keuangan SKPD	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)	
7	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya	Ada/ tidak ada	
		Penggunaan Asst SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai SKPD x100%	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak-----aset - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak-----aset%	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASIMASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Jumlah sebanyak----jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada,sebutkan survey kepuasan tentang----	Ada/tidakada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD



IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

PROVINSI :
NAMA SKPD :
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)
1. Urusan :
2. Urusan : (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

Dilisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan(1)	Urusan(2)	Urusan(1)	Urusan(2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional yang melekat di kementerian/LPND yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak program.	Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak program.	%	%	
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen /LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP tlg 2. SOP tlg 3. SOP tlg 4. Dst	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak yang terdiri dari: 1. SOP tlg 2. SOP tlg 3. SOP tlg 4. Dst	Ada --SOP/ Tidak Ada	--SOP/ Tidak Ada	Sesuai urusan.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tlg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tlg SPM x 100%	PERDA pelaksanaan sebanyak PERDA yang seharusnya, sebanyak SPM	PERDA pelaksanaan sebanyak PERDA yang seharusnya, sebanyak	%	%	1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKB 6. SPM Pemberdayaan Perempuan
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian Struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang tensi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	Jabatan yang terisi sebanyak	Jabatan yang terisi sebanyak	%	%	Lihat Petunjuk pengisian IKK

R B

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja	KETERANGAN	
						Urusan(1) ---- (7A)	Urusan(2) ---- (7B)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Urusan(1) ---- (7A)	Urusan(2) ---- (7B)	Urusan(1) ---- (8A)	Urusan(2) ---- (8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	
			6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	PNS yang menangani urusan(1)SKPD, sebanyak-----personil Total PNS Provinsi, sebanyak-----personil	PNS yang menangani urusan (2) SKPD, sebanyak-----personil Total PNS Provinsi, sebanyak-----personil			Lihat Petunjuk pengisian IKK
4	PENGLOLAANKEPE GAWAINDAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim,sebanyak -----org. Pejabat yang ada, sebanyak-----org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak -----org. Pejabat yang ada, sebanyak-----org.	-----%	-----%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepengangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepengangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Pejabat yang memenuhi kepengangkatan, sebanyak-----org Jabatan yang ada, sebanyak-----jbt.	Pejabat yang emenuhi kepengangkatan, sebanyak-----org. Jabatan yang ada, sebanyak-----jbt.	-----%	-----%	
			9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJASKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada, Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014,sebanyak----- jenis,yg terdiri dari: 1..... 2..... 3.....	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014, sebanyak-----jenis, yg terdiri dari: 1..... 2..... 3.....	-----jenis dokumen	-----jenis dokumen	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak----- program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak-----	Program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak----- program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak-----	-----%	-----%	Mengacu dokumen RPKD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan(1)--- (7A)	Urusan(2)--- (7B)	Urusan(1)--- (8A)	Urusan(2)--- (8B)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak---program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak---program.	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak---program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak---program.	%	%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran		12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DP SKPD, sebanyak---program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak---program.	Program RENJASKPD yang diakomodir dalam DPASKPD, sebanyak---program. Program dalam DPAKPD,	%	%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015.	
	Realisasi anggaran		13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD APBD x 100%	Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total Belanja APBD, sebesar-----	Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total Belanja APBD,sebesar---	%	%	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015.	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD(realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPDx100%	Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.----- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	Belanja Modal SKPD,sebesarRp.----- Tota Belanja SKPD, sebesar Rp.-----	%	%	Mengacu LKD tahun 2015.	
			15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa(realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD)x100%	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.-----	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesarRp.-----	%	%	Mengacu LKD tahun 2015.	
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD(realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPDx100%	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.----- Tota lbelanja SKPD, sebesar Rp.-----	Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja SKPD, sebesar Rp.-----	%	%	Mengacu APBD tahun 2015	
	Besaran belanja pemeliharaan		17	Keberadaan aporan keuangan SKPD(Neraca,Calc)	Ada atau tidak ada aporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada(Neraca,Calc)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak---jenis, sbb: 1..... 2..... 3.....	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak---jenis, sbb : 1..... 2..... 3.....	TidakAda /Ada sebanyak---jenis:-----	TidakAda /Ada sebanyak---jenis:-----	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap(Neraca,LRA, CaLK)	

R p

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja Urusan(1)---- Urusan(2)----	KETERANGAN
						Urusan(1)---- (7A)	Urusan(2)---- (7B)		
7	PENGELOLAAN BARANG DAERAH MILIK	Manajemen aset SKPD	(4) 18	(5) Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	(6) Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumentasinya.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	(8A) Ada/ tidak ada (8B) Ada/ tidak ada	(9)
19	Fennggunaan Aset SKPD	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD			Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi total aset yang dikuasai: SKPD x100%	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak ---aset. - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak----- aset.	- Aset yang tidak digunakan, sebanyak--- aset. - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak----- aset.%%	Inventarisasi dilakukan minimal 1kali dalam 5Tahun.
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASIMASYA RAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi: 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keliling 10. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Jumlah sebanyak --- ---jenis ---jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.



Lampiran IV : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2016
Tanggal 19 Februari 2016

IKK TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD
TERHADAP LPPD TAHUN 2015

NO (1)	URUSAN (2)	NO (3)	IKK (4)	RUMUS (5)	CAPAIAN KINERJA (6)	KETERANGAN (7)
URUSAN WAJIB						
1	Pendidikan	1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI -----x100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI	%	
2		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS -----x100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS	%	
3		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA -----x100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA	%	
4		4	Pembinaan Guru jenjang SD/MI	Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi -----x100% Jumlah Guru jenjang SD/MI	%	
5		5	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS	Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi -----x100% Jumlah Guru jenjang SMP/MTS	%	
6		6	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi -----x100% Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA	%	
7		7	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peta penjaminan mutu pendidikan	Ada/tidak*)	

R F

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	Kesehatan	8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama	%	
		9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama	%	
		10	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child immunization(UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan UCI}}{\text{Jumlah Seluruh Desa /Kelurahan}} \times 100 \%$	%	
		11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. di satu wil. kerja pada kurun waktu tertentu x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	%	
		12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. kerja selama 1 thn x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	%	
		13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. kerja selama 1 thn x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	%	
		14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 x 100 % Jumlah seluruh miskin di Kota	%	
		15	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	%	
3	Lingkungan Hidup	16	Pencemaran Udara	Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri x 100 % Jumlah seluruh kabupaten dan kota	%	
		17	Pasar	Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional	%	

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
4	Pekerjaan Umum	18	Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS (m3)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$		
19		Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan penda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100\%$	%		
20		Jalan provinsi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang seluruh jalan provinsi}}{\text{Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik}} \times 100\%$	%		
21		Rumah tangga bersantasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga ber sanitasi}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	%		
22		Kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	%		
23		Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	$\frac{\text{Luas ruang terbuka hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100\%$	%		
24		Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD	Ada/tidak	Ada/tidak*)		
25		Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD	Ada/tidak	Ada/tidak*)		
26		Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPDP	Ada/tidak	Ada/tidak*)		
27		Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	Jumlah program RKPDP tahun berkenaan	$\frac{\text{Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}}{\text{Jumlah program RKPDP tahun berkenaan}} \times 100\%$	%	
7	Perumahan	28	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	%	
29		Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pmda ybs.}} \times 100\%$	%		
8	Kepemudaan & Olahraga	30	Gelandang /balai remaja (selain milik swasta)	$\frac{\text{Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	%	
31		Lapangan olah raga	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga yang ada}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	%		
9	Penanaman Modal	32	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	$\frac{\text{Realisasi PMDN thn 2015- Realisasi PMDN 2014}}{\text{Realisasi PMDN 2014}} \times 100\%$	%	

RP

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
10	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif x 100 % %	
		34	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah seluruh koperasi x 100 % %	
11	Kependudukan & Catatan Sipil	35	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Jumlah usaha mikro dan kecil x 100 %	Ada/tidak ada	
12	Ket. Kerja	36	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah seluruh UKM	Ada/tidak ada	
		37	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif : 100 % %	
		38	Regulasi ketahanan pangan	Jumlah pekerja/buruh %	
13	Ketahanan Pangan	39	Ketersediaan pangan utama	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan x 100 %	Ada/tidak ada	
		40	Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Jumlah pencari kerja yang mendaftar %	
14	Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak	41	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Ada/Tidak	Ada/tidak ada	
		42	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) x 1000 %	
9	Penanaman Modal	43	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB(PLKB/PKB) setiap desa/kelurahan	Jumlah penduduk Pekerja perempuan dilembaga pemerintahx100% %	
		44	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Jumlah pekerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x 100 % %	
15	KB&KS	45	Website milik pemerintah daerah	Jumlah angkatan kerja perempuan Realisasi PMDN thn 2015- Realisasi PMDN 2014 x100% %	
		46	Website milik pemerintah daerah	Realisasi PMDN 2015 x100% %	
16	Perhubungan	47	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Jumlah peserta program KB aktif x 100 % %	
		48	Website milik pemerintah daerah	Jumlah pasangan usia subur Jumlah desa/kelurahan x 100 % %	
17	Komunikasi&Informatika	49	Website milik pemerintah daerah	PLKB/PKB %	
		50	Website milik pemerintah daerah	Jumlah angkutan darat Jumlah penumpang angkutan darat %	

RF

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
18	Pertanahan	46	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan pertahun	
19	Kesbang&Politik	47	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah x 100 % %	
20	Otonomi Daerah	48	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	
		49	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	
		50	Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	
21	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	51	Tapa Ibatas	Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan x 100% Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan %	
22	Sosial	52	PKK aktif	Jumlah PKK aktif x 100 % Jumlah PKK %	
23	Budaya	53	Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana social seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat disuatu daerah	
		54	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan x 100% Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan %	
		55	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	
		56	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	
24	Statistik	57	Buku 'propinsi dalam angka'	Ada/Tidak	Ada/ tidak*)	
25	Kearsipan	58	Buku 'PDRB provinsi'	Ada/Tidak	Ada/ tidak*)	
		59	Pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku x 100% Jumlah SKPD %	
		60	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	
		61	Koleksi buku yang tersedia dipustakaakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia dipustakaakaan daerah x 100% Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia dipustakaakaan daerah	
26	Perpustakaan	62	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun x 100% Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	

r p

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
URUSAN PILIHAN						
1	Kelautan & perikanan	1	Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah Produksi Ikan (Ton/tahun)}}{\text{Target Daerah (Ton/tahun)}} \times 100\%$	%	
2		2	Ekspor hasil perikanan	$\frac{\text{Nilai export hasil perikanan (Fp)}}{\text{Target daerah}} \times 100\%$	%	
3		3	Konsumsi ikan	$\frac{\text{Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)}}{\text{Target Daerah (Kg)}} \times 100\%$	%	
2	Pertanian	4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	$\frac{\text{Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)}}{\text{Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)}} \times 100\%$	%	
5		5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015**)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dan sektor pertanian}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	%	
3	Kehutanan	6	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100\%$	%	
4		7	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas Kerusakan Kawasan Hutan}}{\text{Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$	%	
5	Energi dan SDM	8	Pertambangan tanpa izin	$\frac{\text{Luas Penambangan Liar yang diterbitkan}}{\text{Luas area penambangan yang liar}} \times 100\%$	%	
6		9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015**)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	%	
5	Pariwisata	10	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahunorang	
6		11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015**)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	%	
6	Industri	12	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2015**)	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dan sektor industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	%	
7		13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah Industri tahun 2015 - Jumlah Industri tahun 2014}}{\text{Jumlah Industri s/d tahun 2015}} \times 100\%$	%	
	Perdagangan	14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	%	
		15	Eksport Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	US\$.....	

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
8	Transmigrasi	16	Transmigran swakarsa	$\frac{\text{Jumlah transmigran swakarsa}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100\%$	%	



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Lampiran V : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2016
Tanggal 19 Februari 2016

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN TAHUN 2015

No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI 2. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI 3. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS 4. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS 5. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA 6. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA 7. Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 8. Jumlah Guru jenjang SD/MI 9. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 10. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS 11. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 12. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA 13. Peta penjaminan mutu pendidikan 	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 3. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 4. Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yang sama 5. Jumlah Desa/Kelurahan UCI 6. Jumlah seluruh Desa/Kelurahan 7. Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di saat wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 8. Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 9. Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 tahun 10. Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama 11. Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 tahun 12. Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 13. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 14. Jumlah seluruh miskin 15. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. Sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 16. Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Tarakan 3. RSUD Koja 4. RSUD Budhi Asih 5. RSUD Pasar Rebo 6. RSKD Duren Sawit 7. RSUD Cengkareng

11

No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
3.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kabupaten dan Kota yang dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri 2. Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi 3. Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 4. Jumlah daya tampung TPS (m2) 5. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda dari jumlah kasus yang ada 	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
4.	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik 2. Panjang seluruh jalan Provinsi 3. Jumlah rumah tangga bersanitasi 4. Jumlah total rumah tangga 5. Jumlah Rukuh Warga (RW) kumuh 6. Jumlah Rukuh Warga (RW) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tata Air 2. Dinas Bina Marga 3. Dinas Kebersihan 4. Dinas Pertamanan dan Pemakaman
5	Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Ruang Terbuka Hijau 2. Luas wilayah ber HPL/HGB 	Dinas Penataan Kota
6.	Perencanaan dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda RPJPD 2. Perda RPJMD 3. Perda RKPD 4. Jumlah program RKPD tahun 2015 5. Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2015 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 2. Jumlah seluruh rumah tangga 3. Jumlah rumah layak huni 4. Jumlah seluruh rumah 	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
8.	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (milik pemerintah) 2. Jumlah lapangan olahraga milik Pemda 3. Jumlah Penduduk tahun 2015 	Dinas Olahraga dan Pemuda
9.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai realisasi PMDN 2014 (miliar rupiah) 2. Nilai realisasi PMDN 2015 (miliar rupiah) 3. Jumlah proyek PMDN 4. Nilai realisasi PMA 2014 (miliar rupiah) 5. Nilai realisasi PMA 2015 (miliar rupiah) 6. Jumlah proyek PMA 	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal
10.	Koperasi & UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi aktif 2. Jumlah koperasi 3. Jumlah Usaha Mikro & Kecil 4. Jumlah seluruh UKM 	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan database kependudukan 2. Perda tentang kependudukan 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Ketenakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) 2. Jumlah penduduk angkatan besar 3. Jumlah pencari kerja yang mendaftar 4. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen regulasi ketahanan pangan 2. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama 	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.	KB & KS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pasangan usia subur 2. Jumlah peserta program KB aktif 3. Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 4. Jumlah Keluarga 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana

No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
15.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angkutan darat 2. Jumlah penumpang angkutan darat 3. Jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya atau penggunaannya 	Dinas Perhubungan dan Transportasi
16.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website milik Pemda 2. Jumlah dan jenis pameran/expo 	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
17.	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh bidang tanah dan luasnya 2. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat dan luasnya 	Dinas Penataan Kota
18.	Kesbang dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Partai Politik 2. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 3. Jumlah LSM, Ormas dan OKP 4. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan LKP 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19.	Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 2. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan 3. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan 4. Tanggal dan Nomor Perda Penetapan APBD 5. Tanggal dan Nomor surat Penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP No. 8/2006 6. Tanggal dan nomor surat penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3/2007 7. Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 8. Jumlah APBD tahun yang bersangkutan 9. Realisasi pencapaian PAD 10. Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. BPKAD 3. BKD 4. Badan Diklat 5. BPBD 6. BPTSP 7. BPBJ 8. Dinas Pelayanan Pajak 9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 10. Satpol PP 11. Biro Tata Pemerintahan 12. Biro Hukum 13. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 14. Biro KDH dan KLN 15. Biro Umum 16. Biro Perekonomian 17. Biro Penataan Kota dan LH 18. Biro Akas 19. Biro Dikmental 20. Biro Kesos 21. Sekretariat DPRD 22. Sekretariat DP KORPRI 23. Walikota Jakarta Pusat 24. Walikota Jakarta Utara 25. Walikota Jakarta Barat 26. Walikota Jakarta Selatan 27. Walikota Jakarta Timur 28. Kabupaten Kepulauan Seribu
20.	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota PKK 2. Jumlah anggota PKK aktif 3. Jumlah anggaran PPMK yang sudah diberikan berdasarkan kelompoknya 4. Jumlah Pemanfaat Dana PPMK 5. Perkembangan dan Bina Ekonomi PPMK 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana

No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
21.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lain-lain yang terdapat di suatu daerah 2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 3. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan 	Dinas Sosial
22.	Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah dan jenis sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jumlah sanggar kesenian 4. Jumlah bangunan/benda cagar budaya 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku 'Provinsi dalam Angka' 2. Buku "PDRB Provinsi" 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24.	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku 2. Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 2015 3. Jumlah pejabat fungsional kearsipan 	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
25.	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koleksi judul buku minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah koleksi buku minimal 2 tahun terakhir 3. Jumlah pengunjung ke perpustakaan setiap tahun minimal 3 tahun terakhir 4. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani 	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
26.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah produksi perikanan setiap tahun minimal 2 tahun terakhir 2. Nilai ekspor hasil perikanan per tahun minimal 2 tahun terakhir 3. Target ekspor hasil perikanan per tahun (tahun 2015) 4. Jumlah konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir 5. Target konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir 	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
27.	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi tanaman padi (ton) tahun 2015 2. Luas areal tanaman padi (ha) tahun 2015 3. Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian (Rp Miliar) tahun 2015 4. Jumlah total PDRB tahun 2015 	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
28.	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2015 2. Luas total hutan dan lahan kritis tahun 2014 3. Luas kerusakan kawasan hutan (ha) tahun 2015 4. Luas kawasan hutan (ha) tahun 2015 	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

FT

No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
29.	Energi dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas pengembangan liar yang ditertibkan tahun 2015 2. Luas area penambangan yang liar tahun 2015 3. Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan tahun 2015 4. Jumlah total PDRB 	Dinas Perindustrian dan Energi
30.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kunjungan wisata minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah industri pariwisata minimal 2 tahun terakhir 3. PAD sektor pariwisata minimal 2 tahun terakhir 4. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata (Rp triliun) tahun 2015 5. Jumlah total PDRB (Rp Triliun) tahun 2015 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
31.	Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri (Rp triliun) tahun 2015 2. Jumlah industri minimal 2 tahun terakhir 	Dinas Perindustrian dan Energi
32.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan tahun 2015 2. Nilai ekspor tahun 2015 3. Nilai impor tahun 2015 	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
33.	Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah transmigran swakarsa tahun 2015 2. Jumlah seluruh transmigran tahun 2015 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

[Signature]
Basuki T. Purnama

Lampiran VI : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2016
Tanggal 19 Februari 2016

BIODATA LIAISON OFFICER
LPPD TAHUN 2015

Nama : _____
NIP/NRK : _____
Pangkat/Golongan : _____
Jabatan : _____
SKPD/UKPD : _____
Alamat kantor : _____
Telp dan Fax kantor : _____
No. Handphone : _____
Alamat email : _____



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama
Basuki T. Purnama